



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TUNAS AGUNG JIWA BRATA**
2. Jabatan : **KEPALA SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN INVESTASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN**
3. NHK : **109153**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.935.000.000

1. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/54 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 230.000.000
5. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 210.000.000
6. Tanah Seluas 73 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 205.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 282.600.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.100.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ETIOS FALCO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.



40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	639.429.117
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.879.529.117
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.879.529.117

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.